

Analisis Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Pangandaran

by Putri Aksa Yemima

Submission date: 16-Jul-2024 02:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 2417667362

File name: nyelenggaraan_Tata_Kelola_Pemerintahan_Kabupaten_Pangandaran.pdf (331.37K)

Word count: 3320

Character count: 24322



Analisis Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Pangandaran

Putri Aksa Yemima^{1*}, Ester Yulianti Pakpahan², Muhammad Miftah Fauzan³, Thalia Oktaviana Adianto⁴, Ivan Darmawan⁵

¹⁻⁵ Universitas Padjadjaran

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Korespondensi penulis: putri22019@mail.unpad.ac.id*

Abstract. *Supervision in regional government governance is very important to create effective, efficient and transparent government. Pangandaran District faces major challenges in supervision, including low transparency, community participation, misalignment of program planning and implementation, and low accountability. This research analyzes the effectiveness of supervision in Pangandaran, identifying obstacles, and providing recommendations for improvement. Using qualitative methods and literature studies, the research results show the need for increased transparency, community participation, harmonized planning and accountability. Implementation of these recommendations is expected to improve government governance and increase public trust.*

Keywords: *supervision effectiveness, government oversight, governance*

Abstrak. Pengawasan dalam tata kelola pemerintahan daerah sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Kabupaten Pangandaran menghadapi tantangan besar dalam pengawasan, termasuk rendahnya transparansi, partisipasi masyarakat, ketidakselarasan perencanaan dan pelaksanaan program, serta rendahnya akuntabilitas. Penelitian ini menganalisis efektivitas pengawasan di Pangandaran, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan metode kualitatif dan studi kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, perencanaan yang selaras, dan akuntabilitas. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kata kunci: efektivitas pengawasan, pengawasan pemerintahan, tata kelola pemerintahan

1. LATAR BELAKANG

Pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah memegang peran yang cukup krusial dalam mewujudkan suatu wujud pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Kabupaten Pangandaran, sebagai daerah dengan pertumbuhan dan dinamika yang signifikan, menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan pengawasan yang memadai pada setiap sektor pemerintahan. Pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai kontrol terhadap penyimpangan tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan standar pelaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, pengawasan merupakan alat krusial untuk menyeimbangkan kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Otonomi daerah yang telah mendelegasikan kewenangannya kepada kabupaten yang bermaksud mengatur urusan internalnya sendiri menuntut adanya pengawasan yang efektif agar dapat meminimalisasi potensi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Penyelenggaraan sebuah tata kelola

³
Received: Mei 10, 2024; Revised: Juni 15, 2024; Accepted: Juli 14, 2024; Online Available: Juli 16, 2024;

* Putri Aksa Yemima , putri22019@mail.unpad.ac.id

pemerintahan yang baik sangat bergantung pada bagaimana pengawasan diterapkan, terutama dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkah administrasi dan operasional.

Kabupaten Pangandaran, dengan kompleksitasnya, seringkali menghadapi berbagai masalah dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu masalah utama adalah efektivitas pengawasan yang masih dipertanyakan. Beberapa indikator dari masalah ini antara lain yaitu, rendahnya tingkat transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, permasalahan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan, hingga tingkat akuntabilitas yang rendah di berbagai tingkat pemerintahan. Pengawasan merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Di Kabupaten Pangandaran, efektivitas pengawasan menjadi krusial dalam menghadapi berbagai tantangan tata kelola pemerintahan, termasuk rendahnya tingkat transparansi, kurangnya partisipasi masyarakat, ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program, serta rendahnya tingkat akuntabilitas pada berbagai tingkat pemerintahan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Salah satu masalah utama dalam pengawasan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran adalah rendahnya tingkat transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan (Surono, 2022). Transparansi, yang merupakan dasar dari akuntabilitas dan partisipasi publik, sering kali tidak terwujud dengan baik. Informasi terkait program pemerintah, termasuk laporan keuangan dan hasil pelaksanaan, tidak selalu tersedia atau mudah diakses oleh publik. Kurangnya publikasi yang memadai dan saluran informasi yang terbatas membuat masyarakat kesulitan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk memantau kinerja pemerinta. Hal ini tidak hanya menghambat proses pengawasan oleh masyarakat, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketidakefektifan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi penghambat utama dalam penyampaian informasi yang seharusnya dapat mendukung transparansi (Dewi, 2021).

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan masih rendah (Suryadi, 2020). Partisipasi publik merupakan komponen penting dalam menciptakan pengawasan yang menyeluruh dan efektif, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah. Namun, di Kabupaten Pangandaran, kesadaran masyarakat mengenai peran mereka dalam pengawasan masih minim. Faktor-faktor sosial dan budaya, seperti rasa segan terhadap pejabat atau norma hierarkis,

sering menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Ditambah lagi, kurangnya fasilitas dan mekanisme yang mendukung partisipasi masyarakat, seperti forum diskusi dan saluran pengaduan yang memadai, menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi kurang efektif. Ketidaksiharasan antara perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah juga menjadi isu yang signifikan (Putri, 2020). Banyak program pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal karena perencanaan sering kali tidak mempertimbangkan kondisi lapangan dan sumber daya yang tersedia. Koordinasi yang buruk antar instansi dan lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi menambah kompleksitas masalah ini. Akibatnya, pelaksanaan program sering kali tidak sinkron dengan tujuan yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan pemborosan sumber daya dan menurunkan efisiensi pemerintahan.

Rendahnya tingkat akuntabilitas di berbagai tingkat pemerintahan di Kabupaten Pangandaran juga menjadi penghambat utama efektivitas pengawasan (Ambarwati, 2022). Sistem pertanggungjawaban yang ada sering kali tidak efektif dalam memastikan bahwa pejabat dan instansi pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka (Ambarwati, 2022, hlm. 23). Prosedur yang rumit dan tidak transparan membuat proses pertanggungjawaban sulit dilakukan dengan baik, serta tingkat korupsi yang tinggi semakin memperburuk situasi (Ambarwati, 2022, hlm. 24-25). Tanpa adanya sanksi yang jelas dan tegas, penegakan akuntabilitas menjadi tidak konsisten, dan masyarakat sering kali tidak memiliki saluran yang efektif untuk melaporkan keluhan atau penyimpangan (Sutrisno, 2020).

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menganalisis efektivitas pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pangandaran. (Tim Peneliti, 2023). Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sistem pengawasan yang ada, mengidentifikasi hambatan utama yang menghambat efektivitas pengawasan, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan (Tim Peneliti, 2023). Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sistem pengawasan yang ada berfungsi dan apa saja kekuatan serta kelemahannya (Tim Peneliti, 2023). Dengan mengidentifikasi hambatan yang ada, penelitian ini juga akan membantu mengatasi masalah transparansi, partisipasi masyarakat, ketidaksiharasan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta rendahnya akuntabilitas (Tim Peneliti, 2023). Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban, sehingga dapat

memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Tim Peneliti, 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Pengawasan merupakan suatu bagian integral dari sebuah struktur manajemen yang memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Menurut Hasibuan (2006), pengawasan dapat dipahami sebagai proses untuk menetapkan apa yang harus dicapai, yakni standar; memantau pelaksanaan; mengevaluasi kinerja; serta melaksanakan sebuah evaluasi dengan harapan agar dapat memperbaiki segala kekurangan yang telah terlihat sebelumnya, sehingga pada saat pelaksanaan seluruhnya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan standar yang telah ditetapkan (Hasibuan, 2006:242). Berdasarkan pemahaman ini, pengawasan dapat diartikan sebagai pengaturan kegiatan, cara pengelolaan tugas organisasi agar dapat sesuai dengan peraturan dan arahan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mengukur pencapaian dengan membandingkannya dengan standar yang sebelumnya telah ditetapkan, sehingga objektif dari organisasi tersebut dapat tercapai secara efisien.

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan hasil dari penelitian dengan tujuan mampu menggambarkan manfaat dari diberlakukannya sistem tersebut (Sugiyono, 2013). Kajian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari literatur buku dan jurnal ilmiah yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah memegang peran vital dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Kabupaten Pangandaran, sebagai daerah dengan pertumbuhan dan dinamika yang signifikan, menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan pengawasan yang memadai pada setiap sektor pemerintahan. Pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai kontrol terhadap penyimpangan tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, pengawasan merupakan alat krusial untuk menyeimbangkan kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada kabupaten untuk

mengatur urusan internalnya sendiri menuntut adanya pengawasan yang efektif agar dapat meminimalisasi potensi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik sangat bergantung pada bagaimana pengawasan diterapkan, terutama dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkah administrasi dan operasional. Kabupaten Pangandaran, dengan kompleksitasnya, seringkali menghadapi berbagai masalah dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu masalah utama adalah efektivitas pengawasan yang masih dipertanyakan. Beberapa indikator dari masalah ini antara lain adalah rendahnya tingkat transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, permasalahan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan, serta rendahnya tingkat akuntabilitas di berbagai tingkat pemerintahan. Pengawasan merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Di Kabupaten Pangandaran, efektivitas pengawasan menjadi krusial dalam menghadapi berbagai tantangan tata kelola pemerintahan, termasuk rendahnya tingkat transparansi, kurangnya partisipasi masyarakat, ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program, serta rendahnya tingkat akuntabilitas pada berbagai tingkat pemerintahan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Salah satu masalah utama dalam pengawasan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran adalah rendahnya tingkat transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Transparansi, yang merupakan dasar dari akuntabilitas dan partisipasi publik, sering kali tidak terwujud dengan baik. Informasi terkait program pemerintah, termasuk laporan keuangan dan hasil pelaksanaan, tidak selalu tersedia atau mudah diakses oleh publik. Kurangnya publikasi yang memadai dan saluran informasi yang terbatas membuat masyarakat kesulitan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk memantau kinerja pemerintah. Hal ini tidak hanya menghambat proses pengawasan oleh masyarakat, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketidakefektifan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi penghambat utama dalam penyampaian informasi yang seharusnya dapat mendukung transparansi. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan masih rendah. Partisipasi publik merupakan komponen penting dalam menciptakan pengawasan yang menyeluruh dan efektif, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah. Namun, di Kabupaten Pangandaran, kesadaran masyarakat mengenai peran mereka dalam pengawasan masih minim. Faktor-faktor sosial dan budaya, seperti rasa segan terhadap pejabat atau norma hierarkis, sering menghalangi

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Ditambah lagi, kurangnya fasilitas dan mekanisme yang mendukung partisipasi masyarakat, seperti forum diskusi dan saluran pengaduan yang memadai, menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi kurang efektif.

Ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah juga menjadi isu yang signifikan. Banyak program pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal karena perencanaan sering kali tidak mempertimbangkan kondisi lapangan dan sumber daya yang tersedia. Koordinasi yang buruk antar instansi dan lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi menambah kompleksitas masalah ini. Akibatnya, pelaksanaan program sering kali tidak sinkron dengan tujuan yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan pemborosan sumber daya dan menurunkan efisiensi pemerintahan. Rendahnya tingkat akuntabilitas di berbagai tingkat pemerintahan di Kabupaten Pangandaran juga menjadi penghambat utama efektivitas pengawasan. Sistem pertanggungjawaban yang ada sering kali tidak efektif dalam memastikan bahwa pejabat dan instansi pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Prosedur yang rumit dan tidak transparan membuat proses pertanggungjawaban sulit dilakukan dengan baik, serta tingkat korupsi yang tinggi semakin memperburuk situasi. Tanpa adanya sanksi yang jelas dan tegas, penegakan akuntabilitas menjadi tidak konsisten, dan masyarakat sering kali tidak memiliki saluran yang efektif untuk melaporkan keluhan atau penyimpangan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pangandaran, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat informasi mengenai program pemerintah lebih mudah diakses oleh publik dan memperbaiki saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, laporan keuangan dan hasil pelaksanaan program harus disediakan secara berkala dan transparan. Kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Masyarakat harus diberikan kesadaran tentang pentingnya peran mereka dalam pengawasan pemerintahan. Pengembangan fasilitas dan mekanisme yang mendukung partisipasi masyarakat, seperti forum diskusi dan saluran pengaduan yang efektif, sangat penting. Selain itu, hambatan sosial dan budaya yang menghalangi partisipasi aktif masyarakat harus dikurangi.

Ketiga, menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah dan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan rencana awal. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan juga penting untuk memastikan program yang

direncanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan sumber daya yang tersedia. Keempat, meningkatkan akuntabilitas di berbagai tingkat pemerintahan. Penyederhanaan prosedur pertanggungjawaban untuk memastikan transparansi dan kemudahan dalam pelaporan sangat diperlukan. Selain itu, sanksi yang jelas dan tegas harus diterapkan bagi pelanggaran dan penyimpangan. Pengembangan saluran yang efektif bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan atau penyimpangan juga sangat penting.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menganalisis efektivitas pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pangandaran. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sistem pengawasan yang ada, mengidentifikasi hambatan utama yang menghambat efektivitas pengawasan, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sistem pengawasan yang ada berfungsi dan apa saja kekuatan serta kelemahannya. Dengan mengidentifikasi hambatan yang ada, penelitian ini juga akan membantu mengatasi masalah transparansi, partisipasi masyarakat, ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta rendahnya akuntabilitas. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pengawasan merupakan suatu bagian integral dari sebuah struktur manajemen yang memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Menurut Hasibuan (2006), pengawasan dapat dipahami sebagai proses untuk menetapkan apa yang harus dicapai, yakni standar; memantau pelaksanaan; mengevaluasi kinerja; serta melaksanakan sebuah evaluasi dengan harapan agar dapat memperbaiki segala kekurangan yang telah terlihat sebelumnya, sehingga pada saat pelaksanaan seluruhnya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan standar yang telah ditetapkan (Hasibuan, 2006:242). Berdasarkan pemahaman ini, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu alat pengaturan kegiatan, cara untuk melakukan sebuah pengelolaan tugas organisasi agar sesuai dengan peraturan dan instruksi yang telah ditetapkan, yang mengukur pencapaian dengan membandingkannya dengan standar yang sebelumnya telah ditetapkan, sehingga objektif dari organisasi tersebut dapat tercapai secara efisien. Sesuai dengan apa yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 yang menjelaskan tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada Pasal 1 ayat 3, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang mencerminkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu unsur pemerintahan desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Nurcholis (2011) juga menegaskan bahwa BPD berfungsi sebagai salah satu elemen penyelenggara pemerintahan desa (Nurcholis, 2011 hlm. 77). Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa BPD merupakan sebuah institusi demokratis yang berperan sebagai salah satu elemen utama yang digunakan dalam berjalannya suatu institusi pemerintahan desa. Pembangunan memiliki definisi yang cukup luas atau umum; secara sederhana, pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang diharapkan dapat mengarah kepada kondisi yang jauh lebih baik dan lebih maju daripada sebelumnya. Anwar (2005) mendefinisikan pembangunan sebagai usaha sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan kondisi yang menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga dengan cara yang paling humanistik (Anwar, 2005 hlm. 89).

Dengan demikian, pembangunan dapat dipahami sebagai perubahan yang terjadi secara terus menerus menuju kondisi yang lebih baik dan lebih maju di segala bidang, baik di bidang fisik maupun nonfisik. Hendropuspito (2001) menjelaskan bahwa pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan standar hidup masyarakat agar lebih layak secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi manusia, institusi, dan sumber daya yang ada secara optimal dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa pembangunan adalah proses yang melibatkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Latuconsina (2005) menyatakan bahwa pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik, yang dapat dilihat dari hasil perencanaan yang terprogram dan berorientasi pada kemajuan atau pertumbuhan. Definisi ini menekankan pentingnya perencanaan yang sistematis dan terprogram dalam proses pembangunan untuk mencapai perubahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah memegang peran vital dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Kabupaten Pangandaran, dengan segala kompleksitasnya, menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengimplementasikan pengawasan yang memadai pada setiap sektor pemerintahan. Dengan meningkatkan transparansi, mendorong partisipasi masyarakat, menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program, serta meningkatkan akuntabilitas, diharapkan efektivitas pengawasan dapat ditingkatkan, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud

dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menganalisis efektivitas pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pangandaran, serta memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki sistem pengawasan yang ada, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pangandaran.

DAFTAR REFERENSI

- Aang Kusnendar. (2018). Kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(3), 1–8. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i3.1659>
- Andri, A., Dedi, A., & Suwarlan, E. (2022). Efektivitas pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran.
- Anwar, M. (2005). *Pembangunan berkelanjutan: Perspektif dan aplikasi*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Laporan hasil pemeriksaan atas efektivitas pengawasan pada pemerintahan Kabupaten Pangandaran*. Jakarta: BPK RI.
- Budiawan, A. (2018). Analisa skenario planning kebijakan publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 12–25. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/1080/977>
- Dewi, R. (2021). *Komunikasi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Diwangga, D. G. (2021). Pengembangan potensi desa oleh pemerintah desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Hartono, T. (2019). *Pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, M. S. P. (2006). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismiyarto, I., Madjid, U., Rowa, H., & Johannes, A. W. (2021). Penyelenggaraan dynamic governance dalam penanganan pandemi Covid-19 di kawasan wisata Kabupaten Pangandaran.
- Kewo, C. L., & Rufaedah, Y. (2019, August). Pengaruh penerapan tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit internal terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara). In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 810-823).

- Kodoatie, R. J. (2011). *Pengantar infrastruktur: Sistem, konsep, dan penerapannya*. Yogyakarta: Andi.
- Nurcholis, H. (2011). *Pemerintahan daerah: Otonomi daerah dan demokrasi lokal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Putri, R. D. (2020). *Ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah di daerah otonom*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suryadi, W. (2020). *Partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan daerah: Teori dan praktik*. Malang: UB Press.
- Sutrisno, B. (2020). *Akuntabilitas pemerintah daerah dalam era desentralisasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Tim Peneliti. (2023). *Analisis efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Kabupaten Pangandaran*. Pangandaran: Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Yakub Murdani. (2018). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 104–109. <https://doi.org/10.25147/moderat.v3i4.867>

Analisis Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Pangandaran

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id Internet Source | 1% |
| 2 | ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source | 1% |
| 3 | journal.lppspsemarang.org Internet Source | 1% |
| 4 | bimakab.go.id Internet Source | 1% |
| 5 | Submitted to Sriwijaya University Student Paper | 1% |
| 6 | ejurnalqarnain.stisnq.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | etheses.uin-malang.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | bpsdm.jatimprov.go.id Internet Source | 1% |
| 9 | pdfs.semanticscholar.org Internet Source | 1% |

| | | |
|----|---|------|
| 10 | repository.ub.ac.id Internet Source | 1 % |
| 11 | journal.unismuh.ac.id Internet Source | 1 % |
| 12 | bulelengkab.go.id Internet Source | 1 % |
| 13 | seknasfitra.org Internet Source | 1 % |
| 14 | bag-hukum.malangkab.go.id Internet Source | <1 % |
| 15 | repository.unwira.ac.id Internet Source | <1 % |
| 16 | discovery.researcher.life Internet Source | <1 % |
| 17 | lsmbaratu.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 18 | bebasbanjir2025.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 19 | ejournal.pin.or.id Internet Source | <1 % |
| 20 | jalanreldanjembatan.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 21 | mafiadoc.com Internet Source | <1 % |

22 eprints.ukmc.ac.id Internet Source <1 %

23 www.jim.unsyiah.ac.id Internet Source <1 %

24 Mawardi Mawardi. "RELATIONSHIP OF TEACHER COMMUNICATION TO STUDENT LEARNING MOTIVATION OF FIFTH GRADE IN ELEMENTARY SCHOOL TANGERANG 6 TANGERANG CITY", DIDAKTIKA TAUHIDI: JURNAL PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR, 2018
Publication <1 %

25 journal.uinsgd.ac.id Internet Source <1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Analisis Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Pangandaran

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10
